



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : 800/478/BKD-Gub.ST

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.2/476/BKD-G.ST/2023 Tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Rincian Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian formasi terlampir sebagai berikut :

I. RINCIAN FORMASI

A. Alokasi Formasi

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Tenaga Guru | : 3.127 Formasi |
| 2. Tenaga Kesehatan | : 243 Formasi |
| 3. Tenaga Teknis | : 520 Formasi |
| Jumlah | : 3.890 Formasi |

- B. Rincian formasi serta lokasi penempatan yang telah diinput ke dalam portal <https://SSCASN.bkn.go.id> dapat dilihat pada lampiran I pengumuman ini.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan NI PPPK.
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima puluh);

III. PERSYARATAN KHUSUS DISABILITAS

1. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU .

- A. Kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi;
1. Pelamar Prioritas, yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II, yaitu yang terdaftar pada pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 3. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Guru Non ASN), yaitu Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
- B. Pelamar Kebutuhan Umum meliputi :
1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 2. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- C. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki Kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma IV dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- D. Pelamar lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
1. Pelamar Prioritas;
 2. Eks THK-II;
 3. Guru Non ASN di Sekolah Negeri;
 4. Pelamar Kebutuhan Umum;
- E. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris
 2. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 3. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Seni Budaya Keterampilan.

V. PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

- A. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023 meliputi :
1. Kebutuhan Khusus yaitu Formasi yang tersedia bagi pelamar :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks TKH-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - b. Tenaga Non ASN adalah pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang melamar pada instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus – menerus pada instansi Pemerintah yang dilamar.
 2. Kebutuhan Umum yaitu : Formasi yang tersedia bagi Pelamar di luar kategori Pelamar Khusus yang hanya dapat melamar pada Formasi Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Pengalaman Kerja yang relevan dengan Jabatan yang dilamar dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Pimpinan Unit Kerjanya;
 - b. Bekerja pada Instansi Pemerintah minimal 2 (dua) tahun sampai dengan batas Periode Pendaftaran;
 3. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkan (Daftar jabatan tersebut terlampir pada lampiran II);
- B. Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 2. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
 3. Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya;
 4. Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama.
Pengalaman kerja sebagaimana yang dimaksud huruf B dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja.

VI. PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- A. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Kebutuhan Khusus yaitu Formasi yang tersedia bagi pelamar :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks TKH-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - b. Tenaga Non ASN adalah pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang melamar pada instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus – menerus pada instansi Pemerintah yang dilamar.
 2. Kebutuhan Umum yaitu : Formasi yang tersedia bagi Pelamar di luar kategori Pelamar Khusus yang hanya dapat melamar pada Formasi Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Pengalaman Kerja yang relevan dengan Jabatan yang dilamar dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Pimpinan Unit Kerjanya;
 - b. Bekerja pada Instansi Pemerintah minimal 2 (dua) tahun sampai dengan batas Periode Pendaftaran;
 3. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) dan diunggah pada SSCASN.
 4. Daftar jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan yang tidak menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) tercantum pada lampiran III Pengumuman ini.
- B. Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 2. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
 3. Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya;
 4. Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama.
- Pengalaman kerja sebagaimana yang di maksud huruf B dibuktikan dengan surat keterangan bekerja sampai dengan sekarang yang ditandatangani pimpinan unit kerja.

VII. SELEKSI PENGADAAN

1. Seleksi PPPK terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi;
2. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan dengan menggunakan Metode Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi Kompetensi Memuat :
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. Wawancara.
3. Untuk Pelamar Kategori Khusus dinyatakan lulus jika **BERPERINGKAT TERBAIK**;
4. Pengisian pelamar kategori Khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II terbaik. Jika kebutuhan formasi belum terpenuhi, maka diisi oleh peserta Tenaga Non ASN yang berperingkat terbaik;
5. Untuk Pelamar Kategori Umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai **AMBANG BATAS** dan **BERPERINGKAT TERBAIK**;
6. Nilai Ambang Batas (NAB) untuk seleksi kompetensi PPPK JF Guru, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 yaitu :
 - a. Kompetensi Teknis, Nilai Ambang Batasnya tercantum dalam lampiran IV pengumuman ini.
 - b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Nilai Ambang Batasnya adalah 117 (Seratus Tujuh Belas).
 - c. Wawancara Nilai Ambang Batasnya adalah 24 (Dua Puluh Empat).
7. Nilai Ambang Batas (NAB) untuk seleksi kompetensi PPPK JF TEKNIS dan KESEHATAN, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 yaitu :
 - a. Kompetensi Teknis, Nilai Ambang Batasnya tercantum dalam lampiran V pengumuman ini.
 - b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Nilai Ambang Batasnya adalah 117 (Seratus Tujuh Belas).
 - c. Wawancara Nilai Ambang Batasnya adalah 24 (Dua Puluh Empat)
8. Pelamar JF Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Linier dalam jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam Pangkalan Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

1. Pendaftaran/Registrasi dilaksanakan secara *online* ke alamat website Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September s.d 9 Oktober 2023;
2. Calon pelamar wajib memiliki e-mail yang masih aktif/berlaku;

3. Untuk melakukan pendaftaran secara *online* pelamar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang akan digunakan saat melakukan pendaftaran pada Portal Nasional SSCASN 2023;
4. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode pendaftaran;
5. Pelamar diberikan masa sanggah untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Instansi dapat mengubah keputusan hasil seleksi administrasi apabila sanggahan dari calon pelamar terbukti dan dapat diterima;
6. Pada saat pelamar melakukan pendaftaran secara *online*, wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen dan file video yang dibutuhkan yaitu :
 - a. Asli Surat Lamaran ditulis tangan dengan tulisan rapi dan jelas terbaca, menggunakan tinta hitam, ditulis dengan HURUF BALOK, ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp. 10.000, format terlampir (Tipe File PDF Max 500 KB);
 - b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 (Tipe File JPG Max 300 KB);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Tipe File JPG Max 500 KB);
 - d. Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang disyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - e. Transkrip Nilai Asli (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - f. Asli Surat pernyataan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak TMT PPPK, ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp. 10.000,- oleh pelamar, format terlampir. Dalam hal peserta seleksi tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - g. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi *e-meterai* Rp. 10.000,- oleh calon pelamar, format terlampir (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - h. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal dan masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - i. Asli dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - j. File video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Upload alamat link Video di Portal SSCASN atau bisa menghubungi helpdesk BKD Provinsi Sulawesi Tengah);
 - k. Asli Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti – Kemendikbudristek (bagi lulusan PT luar negeri) (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - l. Asli sertifikat pendidik bagi yang memiliki untuk pelamar jabatan guru, sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - m. Asli Surat Pengalaman Kerja sesuai persyaratan (Tipe File PDF Max 700 KB).
7. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke data base SSCASN;

IX. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi;
2. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
 - a. ASLI Kartu Tanda Penduduk, apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. ASLI Kartu Tanda Peserta Ujian.
3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
4. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui website <http://bkd.sultengprov.go.id>
5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
6. Peserta ujian menggunakan pakaian :

Pria : Kemeja putih, celana panjang hitam dan memakai sepatu.

Wanita: Kemeja putih, Jilbab hitam (bagi yang menggunakan), Rok/celana panjang warna hitam dan memakai sepatu

(tidak diperkenankan memakai baju Kaos, Celana Jeans dan Sandal).
7. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a. Buku-buku dan catatan lainnya;

- b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, gelang, kalung, headset dan lain-lain;
 - c. Makanan dan minuman;
 - d. Senjata api/tajam dan sejenisnya.
8. Prinsip dan Penentuan Kelulusan yaitu :
- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan nilai hasil akhir Seleksi Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPPK;
 - c. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

X. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk PPPK adalah 5 tahun;
2. Tempat dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan di <http://bkd.sultengprov.go.id>;
3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2023 hanya dapat dilihat di situs *online* <https://bkn.go.id>, <http://sscasn.bkn.go.id> atau melalui <http://bkd.sultengprov.go.id>;
4. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 3 (tiga) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi bukan menjadi tanggungjawab tim pengadaan CASN;
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CASN dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (**calo**) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **berhak menggugurkan kelulusan** tersebut dan/atau **diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN**, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023, peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
8. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
9. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui <http://bkd.sultengprov.go.id>;
10. Call Center dan Help Desk terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dapat menghubungi nomor **0858-2330-0677 (hanya menerima WhatsApp dan sms)** pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 Wita;

XI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023

9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui - <https://sscasn.bkn.go.id> atau dapat dilihat langsung di <http://bkd.sultengprov.go.id>

Palu, 19 September 2023



H. RUSDY MASTURA

LAMPIRAN I

Nomor : 800/478/BKD-Gub-ST

Tanggal : 19 September 2023

I. TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UMUM/KHUSUS	DISABILITAS	LOKASI FORMASI
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	20	20	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	102	100	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	73	70	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	113	110	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	126	124	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
6	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN	38	38	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
7	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN	50	50	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
8	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK	30	30	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
9	AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	5	5	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
10	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	40	40	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
11	AHLI PERTAMA - GURU ANIMASI	3	3	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
12	AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI	4	4	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
13	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
14	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	138	138	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
15	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	51	51	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
16	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JEPANG	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
17	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JERMAN	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
18	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	435	435	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
19	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	52	52	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
20	AHLI PERTAMA - GURU BROADCASTING DAN PERFILMAN	3	3	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

21	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	8	8	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
22	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	1	1	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
23	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	28	28	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
24	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	14	14	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
25	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	3	3	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
26	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	39	39	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
27	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	15	15	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
28	AHLI PERTAMA - GURU IPA	12	12	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
29	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	5	5	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
30	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	38	38	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
31	AHLI PERTAMA - GURU KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL	5	5	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
32	AHLI PERTAMA - GURU KULINER	7	7	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
33	AHLI PERTAMA - GURU LAYANAN KESEHATAN	10	10	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
34	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	35	35	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
35	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	125	125	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
36	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL NIAGA	14	14	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
37	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	22	22	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
38	AHLI PERTAMA - GURU PEKERJAAN SOSIAL	4	4	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
39	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	15	15	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
40	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	165	165	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
41	AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	9	9	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
42	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	101	101	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

43	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	5	5	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
44	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	51	51	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
45	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	9	9	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
46	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	145	145	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
47	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	250	250	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
48	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	59	59	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
49	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	9	9	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
50	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN	9	9	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
51	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOSPASIAL	1	1	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
52	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	138	138	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
53	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	20	20	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
54	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
55	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
56	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	12	12	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
57	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	76	76	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
58	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	11	11	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
59	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PERMINYAKAN	8	8	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
60	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	3	3	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
61	AHLI PERTAMA - GURU TIK	340	340	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
62	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA	13	13	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TOTAL		3127	3117	10	

II. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
11	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
12	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
13	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
14	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
15	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2		1	1	28765	RSU UNDATA PALU
16	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2	2			28765	RSU UNDATA PALU
17	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
18	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
19	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
20	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
21	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	1		1		28765	RSU UNDATA PALU

22	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
23	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
24	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
25	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
26	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	1			28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
27	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
28	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
29	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
30	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
31	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
32	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
33	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
34	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
35	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1		1		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
36	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
37	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
38	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
39	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
40	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
41	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
42	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
43	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
44	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK -	2		2		28765	RSU UNDATA PALU

	BEDAH KEPALA DAN LEHER						
45	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
46	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
47	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
48	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
49	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
50	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
51	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	15		13	2	468	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
52	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	17		15	2	28765	RSU UNDATA PALU
53	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2		2		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
54	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	3		3		1251	BBPK, BAPELKES/BAPELKESNAS BAPELKES PALU
55	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	5			28765	RSU UNDATA PALU
56	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1		1		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
57	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	3			28765	RSU UNDATA PALU
58	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1		94568	UPT. PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
59	AHLI PERTAMA - DOKTER	5		5		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
60	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	3			28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
61	AHLI PERTAMA - DOKTER	5		5		28765	RSU UNDATA PALU
62	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
63	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	1		1		468	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
64	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	3		3		468	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
65	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
66	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1		1		94568	UPT. PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
67	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1		1		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
68	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5		4	1	28765	RSU UNDATA PALU
69	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU

70	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
71	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	4		4		28765	RSU UNDATA PALU
72	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4		4		94568	UPT. PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
73	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	4		4		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
74	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
75	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
76	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
77	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
78	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
79	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2		2		468	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
80	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
81	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
82	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	3		3		468	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
83	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
84	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
85	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1			28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
86	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3		3		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
87	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
88	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	9		9		28765	RSU UNDATA PALU
89	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
90	TERAMPIL - NUTRISIONIS	3		3		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
91	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
92	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1			28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
93	TERAMPIL - NUTRISIONIS	4		4		28765	RSU UNDATA PALU
94	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
95	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
96	TERAMPIL - PERAWAT	10		9	1	94568	UPT. PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
97	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	3	2		1	28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
98	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2		2		28765	RSU UNDATA PALU
99	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	11		11		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
100	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
101	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1		1		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

102	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	4		4		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
103	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	2			28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
104	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1		1		28765	RSU UNDATA PALU
105	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2		2		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
106	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	1			28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
107	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	1			28765	RSU UNDATA PALU
108	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2		2		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
109	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	3	3			28765	RSU UNDATA PALU
110	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	7		5	2	28765	RSU UNDATA PALU
111	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1			28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
112	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2		2		94568	UPT. PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
113	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1		1		56142	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
114	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1		1		28769	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
TOTAL		243	48	185	10		

III. TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA - D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR - S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 BIOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN
2	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR - S-1 AKUAKULTUR	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
3	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR - S-1 AKUAKULTUR	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
4	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA - D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR - S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 BIOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN
5	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	D-IV ILMU HUKUM - S-1 ILMU HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK ELEKTRO	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN KERJASAMA , SUB BAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA
8	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN KERJASAMA , SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
9	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH , BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
10	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN

							KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN OTONOMI DAERAH , SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
11	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN KERJASAMA , SUB BAGIAN USAHA/SWASTA
12	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN OTONOMI DAERAH , SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAERAH DAN DPRD
13	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN PEMERINTAHAN , SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
14	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN OTONOMI DAERAH , SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN
15	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 EKONOMI - S-1 PERIKANAN TANGKAP	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
16	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 EKONOMI - S-1 PERIKANAN TANGKAP	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
17	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 EKONOMI - S-1 PERIKANAN TANGKAP	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
18	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 EKONOMI - S-1 PERIKANAN TANGKAP	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
19	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 PETERNAKAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI

20	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 PETERNAKAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
21	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT
22	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT
23	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI
24	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI
25	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI
26	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI
27	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI
28	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI
29	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI SYARIAH	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN , SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN
30	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI SYARIAH	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
31	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 EKONOMI SYARIAH	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

32	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 AGROTEKNOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , BIDANG SARANA DAN PRASARANA
33	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 AGROTEKNOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , BIDANG SARANA DAN PRASARANA
34	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK , SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA
35	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
36	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
37	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN , SUB BAGIAN EVALUASI JABATAN DAN KOMPETENSI JABATAN
38	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
39	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI , SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
40	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN , SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN
41	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH , BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

42	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
43	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERKIMTAN
44	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK , SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN BUDAYA KINERJA
45	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
46	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN PROVINSI , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
47	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
48	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
49	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI , SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
50	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

51	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
52	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II
53	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET
54	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENINGKATAN KAPASITAS DAN DATA LINGKUNGAN HIDUP
55	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
56	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
57	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN , SUB BAGIAN TATA USAHA
58	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DINAS KESEHATAN PROVINSI , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
59	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
60	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
61	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

62	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI, BIDANG TATA LINGKUNGAN
63	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP
64	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI
65	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
66	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA , BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN TATA USAHA
67	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
68	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
69	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
70	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI
71	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA , BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK , SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG /JASA
72	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

73	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
74	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
75	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN TATA USAHA
76	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA , BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA
77	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
78	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , SUB BAGIAN TATA USAHA
79	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
80	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN
81	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN PEMERINTAHAN , SUB BAGIAN TATA USAHA
82	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III

83	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
84	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
85	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL
86	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
87	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI
88	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KELAUTAN DAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I
89	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
90	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , SUB BAGIAN TATA USAHA
91	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
92	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 KEARSIPAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
93	AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 MANAJEMEN INDUSTRI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
94	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 ILMU EKONOMI	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , UPT BALAI LATIHAN KERJA PENINGKATAN PRODKTIVITAS(BLKPP) , SEKSI PELATIHAN TENAGA KERJA

95	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 ILMU EKONOMI	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , KABID PEMB. PELATIHAN, PERLUASAN PENEMPATAN & PROD. TK , KASIE PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
96	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 PENDIDIKAN KIMIA - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
97	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 PENDIDIKAN KIMIA - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
98	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 PENDIDIKAN KIMIA - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
99	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN SENI DAN BAHASA - S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA - S-1 PENDIDIKAN KIMIA - S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI

100	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SENI MURNI - S-1 SENI RUPA - S-1 SENI RUPA MURNI - S-1 SENI TARI - S-1 SENI MUSIK - S-1 KRIYA SENI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGAH
101	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SENI MURNI - S-1 SENI RUPA - S-1 SENI RUPA MURNI - S-1 SENI MUSIK - S-1 KRIYA SENI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN
102	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SENI MURNI - S-1 SENI RUPA - S-1 SENI RUPA MURNI - S-1 SENI MUSIK - S-1 KRIYA SENI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN
103	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SENI MURNI - S-1 SENI RUPA - S-1 SENI RUPA MURNI - S-1 SENI MUSIK - S-1 KRIYA SENI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
104	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 SENI MURNI - S-1 SENI RUPA - S-1 SENI RUPA MURNI - S-1 SENI TARI - S-1 SENI MUSIK - S-1 KRIYA SENI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGAH
105	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK , SEKSI TINDAK LANJUT KASUS
106	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK , SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI
107	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK , SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI
108	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK , SEKSI TINDAK LANJUT KASUS

109	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
110	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI INDUSTRI
111	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN
112	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN	1		1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
113	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN	1	1			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DAN P2HP
114	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT BALAI PERBENIHAN PERIKANAN
115	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI , BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
116	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI , BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
117	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI , BIDANG PERUMAHAN
118	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , KABID PEMB. PELATIHAN, PERLUASAN PENEMPATAN & PROD. TK , KASIE PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
119	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK MESIN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
120	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK MESIN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI

121	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRONOMI - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
122	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 AGROBISNIS - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRONOMI - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
123	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
124	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
125	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , BIDANG TANAMAN PANGAN
126	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , BIDANG HORTIKULTURA
127	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , BIDANG HORTIKULTURA
128	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG , BIDANG TANAMAN PANGAN
129	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
130	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN , SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN JASA, TERTIB NIAGA DAN PENEGAKAN HUKUM
131	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN - S-1 PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

132	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 AKUAKULTUR - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 PERIKANAN TANGKAP	1		1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
133	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 AKUAKULTUR - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 PERIKANAN TANGKAP	1	1			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
134	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI
135	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI
136	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI
137	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI
138	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1		1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT
139	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1	1			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT
140	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI
141	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 EKONOMI SUMBER DAYA KELAUTAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 GEOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI
142	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	15		9	6	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

143	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	5	5			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
144	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 PERKAPALAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KELAUTAN DAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I
145	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II
146	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1			1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III
147	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1			1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PERIKANAN TANGKAP
148	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 PERKAPALAN	1			1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KELAUTAN DAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I
149	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1			1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II
150	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III
151	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1			1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV
152	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV
153	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 KELAUTAN - S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 PERKAPALAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , BIDANG PERIKANAN TANGKAP
154	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KEWIRAUUSAHAAN	S-1 RUMPUN ILMU EKONOMI - S-1 ILMU MANAJEMEN	1			1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

155	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN	S-1 RUMPUN ILMU EKONOMI - S-1 ILMU MANAJEMEN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL
156	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
157	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENINGKATAN KAPASITAS DAN DATA LINGKUNGAN HIDUP
158	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG TATA LINGKUNGAN
159	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENINGKATAN KAPASITAS DAN DATA LINGKUNGAN HIDUP
160	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
161	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
162	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG TATA LINGKUNGAN
163	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 HOLTIKULTURA - S-1 EKONOMI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

164	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAH DAS DAN RHL
165	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE
166	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
167	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT
168	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 BIOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
169	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN - S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 BIOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
170	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG PEMERINTAHAN DESA
171	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN DESA
172	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN DESA
173	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
174	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG PEMERINTAHAN DESA
175	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA
176	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG

							PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
177	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA
178	AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	S-1 KEDOKTERAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KESEHATAN KERJA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I , SEKSI PENGAWASAN NORMA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
179	AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	S-1 KEDOKTERAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KESEHATAN KERJA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I , SEKSI PENGAWASAN NORMA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
180	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	S-1 KIMIA - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI KALIBRASI
181	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	S-1 KIMIA - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
182	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	S-1 KIMIA - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
183	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	S-1 KIMIA - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI KALIBRASI
184	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH
185	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANTAK
186	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN GUNUNG DAKO

187	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SIVIA PATUJU
188	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KULAWI
189	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BANAWA LALUNDU
190	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TOILI BATURUBE
191	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH
192	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN POGOGUL
193	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN POGOGUL
194	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DAMPELAS TINOMBO
195	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DOLAGO TANGGUNUNG
196	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEPO ASA AROA
197	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TOILI BATURUBE
198	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DOLAGO TANGGUNUNG
199	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTUWU MAROSO
200	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU PELING
201	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BANAWA LALUNDU

202	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEPE ASA MAROSO
203	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTUWU MAROSO
204	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
205	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
206	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
207	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
208	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI INDUSTRI
209	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
210	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 TANAMAN PANGAN - S-1 PENYULUH PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
211	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 TANAMAN PANGAN - S-1 PENYULUH PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
212	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
213	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

214	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
215	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
216	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK
217	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK
218	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PEKERJAAN SOSIAL	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
219	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
220	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
221	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI , SEKRETARIS DINAS
222	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

223	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DINAS
224	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
225	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM
226	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
227	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM
228	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH , SEKRETARIAT
229	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET
230	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH , SUB BAGIAN TATA USAHA
231	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN PROGRAM
232	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
233	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI , SEKRETARIAT
234	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , SEKERTARIS

235	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
236	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH , BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
237	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , SEKERTARIS
238	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL - S-1 KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM
239	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
240	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH , BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
241	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI , BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
242	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
243	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
244	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
245	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMA
246	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI , BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

247	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN TATA USAHA
248	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG TATA LINGKUNGAN
249	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMK
250	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
251	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM
252	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , SEKSI PEMBINAAN SMK
253	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , SEKSI PEMBINAAN SMA
254	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SUB BAGIAN TATA USAHA
255	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH, BIDANG PERIKANAN TANGKAP
256	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMA
257	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
258	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

259	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
260	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
261	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
262	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMK
263	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENINGKATAN KAPASITAS DAN DATA LINGKUNGAN HIDUP
264	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMA
265	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , BIDANG KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN
266	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , SEKSI PEMBINAAN SMK
267	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
268	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN , SUB BAGIAN TATA USAHA
269	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , SEKSI PEMBINAAN SMA

270	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KELAUTAN DAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I
271	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
272	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
273	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
274	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , SUB BAGIAN TATA USAHA
275	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KELAUTAN DAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I
276	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
277	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA , BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN TATA USAHA
278	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
279	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA , SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
280	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , UPT

							, SEKSI PEMBINAAN SMK
281	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGAH
282	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMA
283	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
284	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMA
285	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN , SUB BAGIAN TATA USAHA
286	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III
287	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II , SUB BAGIAN TATA USAHA
288	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
289	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMK
290	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
291	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH , SUB BAGIAN TATA USAHA
292	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM

293	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH , BAGIAN PEMERINTAHAN , SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH
294	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN , SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN
295	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
296	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
297	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMA
298	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, HUKUM DAN ORGANISASI , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN , SUB BAGIAN PENYIAPAN MATERI PIMPINAN
299	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		2		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , SEKSI PEMBINAAN SMK
300	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II
301	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
302	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

303	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
304	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
305	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , SUB BAGIAN TATA USAHA
306	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III
307	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMA
308	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
309	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I , SEKSI PEMBINAAN SMA
310	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN , SUB BAGIAN TATA USAHA
311	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
312	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III , UPT , SEKSI PEMBINAAN SMK
313	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN ANALISA DAN KOMPETENSI JABATAN , SUB BAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN
314	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA

315	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN PROVINSI , SEKERTARIS DINAS , SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET
316	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH , BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
317	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II
318	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENINGKATAN KAPASITAS DAN DATA LINGKUNGAN HIDUP
319	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	2		1	1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ORGANISASI , BAGIAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK , SUB BAGIAN TATALAKSANA DAN BUDAYA KINERJA
320	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI , BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
321	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
322	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
323	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
324	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
325	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
326	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
327	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

328	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
329	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
330	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	D-IV DESAIN GRAFIS	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
331	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGAH
332	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , KABID DEPOSIT , PENGEMBANGAN KOLEKSI , PENGOLAHAN & KONSERVASI BHN PERPUSTAKAAN
333	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN & PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
334	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN & PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
335	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , KABID DEPOSIT , PENGEMBANGAN KOLEKSI , PENGOLAHAN & KONSERVASI BHN PERPUSTAKAAN
336	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI , UPT TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGAH
337	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , KABID LAYANAN , ALIH MEDIA , OTOMASI & KERJASAMA PERPUSTAKAAN
338	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , KABID LAYANAN , ALIH MEDIA , OTOMASI & KERJASAMA PERPUSTAKAAN

339	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIK - S-1 STATISTIKA	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI , BIDANG STATISTIK
340	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIK - S-1 STATISTIKA	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI , BIDANG STATISTIK
341	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	S-1 GEOGRAFI	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI
342	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	S-1 GEOGRAFI	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI , UPT KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI
343	AHLI PERTAMA - WIDYAIKWARA	S-2 KESEHATAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN , UPT , SEKSI PENYELENGARAAN DIKLAT
344	AHLI PERTAMA - WIDYAIKWARA	S-2 KESEHATAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN , UPT , SEKSI PENYELENGARAAN DIKLAT
345	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	20		20	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
346	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
347	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
348	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN PROVINSI , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
349	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP
350	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1	1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN , UPT , SUB BAGIAN TATA USAHA
351	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1		1	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KESEHATAN PROVINSI , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN PROVINSI , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

352	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
353	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN - D-III KOMPUTER - D-III KEARSIPAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP
354	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	D-III SENI PERTUNJUKAN - D-III KRIYA SENI - D-III SENI TEATER - D-III SENI RUPA - D-III SENI TARI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , BIDANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN
355	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	D-III SENI PERTUNJUKAN - D-III KRIYA SENI - D-III SENI TEATER - D-III SENI RUPA - D-III SENI TARI	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
356	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	D-III SENI PERTUNJUKAN - D-III KRIYA SENI - D-III SENI TEATER - D-III SENI RUPA - D-III SENI TARI	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN
357	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN	D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - D-III PERLINDUNGAN TANAMAN	1	1			GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
358	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN	D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - D-III PERLINDUNGAN TANAMAN	1		1		GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI
TOTAL			520	104	353	63	



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

LAMPIRAN II

NOMOR : 800/478/BKD-Gub-ST

TANGGAL : 19 September 2023

**DAFTAR JENIS JABATAN YANG MENSYARATKAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA/JENIS SERTIFIKAT (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KET
1	Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat	Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri	25%	Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
		2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	12.5%	
			Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan	5%	
2	Analisis Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat	Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri	25%	Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
		2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	12.5%	
			Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan	5%	
3	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA		Sertifikat selam (minimal A1/Basic Diver/Open Water Diver) yang diterbitkan oleh Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (PORSSI)	25%	
4	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA		ANKAPIN/ATKAPIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan	25%	
			Sertifikat Bidang Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP dengan masa berlaku 3 tahun	15%	
5	Analisis Pasar Hasil Perikanan		Sertifikat Kluster Pemasaran Produk Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan dengan masa berlaku 3 tahun	25%	
6	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama		Sertifikat Kluster Pembuatan Diversifikasi Olahan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan dengan masa berlaku 3 tahun	25%	
7	Pengawas Perikanan Ahli Pertama		Sertifikat Bidang Kelautan atau Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP dengan masa berlaku 3 tahun	15%	
8	Pekerja Sosial Ahli Pertama		Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial (LSPS) yang masih berlaku	25%	
9	Penyuluh Sosial Ahli Pertama		1. Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Sosial; 2. Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial; atau 3. Sertifikasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: a) Pendamping PKH; b) Pendamping Rehabilitasi Sosial; c) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM); d) Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas); atau e) Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial (LSPS)/ Instansi Pembina yang masih berlaku	25%	
10	Penguji Mutu Barang Jenjang Keahlian		Sertifikat Pelatihan Awareness ISO 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku	10%	
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	25%	
12	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	25%	

13	Widyaiswara		Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi metodologi pelatihan Jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	25%	
			Sertifikasi Kompetensi Kluster Metodologi Pelatihan yang mencakup penyusunan program pelatihan dan media pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	25%	
			Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan Training of Trainer atau metodologi pengajaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi	25%	
14	Pamong Budaya Ahli Pertama		Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Kebudayaan (bidang Permuseum, Nilai Budaya, Cagar Budaya, Kesenian, atau Perfilman) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kebudayaan yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku saat pendaftaran	25%	
15	Pamong Budaya Terampil		Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Kebudayaan (bidang Permuseum, Nilai Budaya, Cagar Budaya, Kesenian, atau Perfilman) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kebudayaan yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku saat pendaftaran	25%	
16	Penyuluh Pertanian Keahlian		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
17	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Telah mengikuti Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan/UPTP/UPTD/Balai K3/Lembaga yang berwenang yang berlaku 5 tahun terakhir	Sertifikat keahlian yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi diantaranya LSP/BNSP/UPTP/UPTD Balai K3/Lembaga yang berwenang, antara lain: a. Ahli K3 Umum b. Ahli Higiene Industri Muda c. Ahli K3 Kimia d. Ahli K3 Listrik e. Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja f. Ahli K3 Muda lain di bidang Keselamatan Kerja dengan masa berlaku 3 tahun terakhir	10%	
18	Instruktur Ahli Pertama		Sertifikat Kompetensi Metodologi Pelatihan Kerja Level 3 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan masa berlaku 3 tahun terakhir	20%	
			Memiliki sertifikat kompetensi keahlian KKNi minimal Level 1 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi BNSP yang berlaku 3 tahun terakhir		

19	Penata Kelola Perumahan Pertama		<p>Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Arsitek 2 Ahli Desain Interior 3 Ahli Arsitektur Lansekap 4 Teknik Iluminasi 5 Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan 6 Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan 7 Ahli Geoteknik 8 Ahli Geodesi 9 Ahli Teknik Mekanikal 10 Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi 11 Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik 12 Ahli Teknik Proteksi Kebakaran 13 Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung 14 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung 15 Ahli Teknik Lingkungan 16 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 17 Ahli Manajemen Konstruksi 18 Ahli Manajemen Proyek 19 Ahli K3 Konstruksi 20 Ahli Sistem Manajemen Mutu <p>atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 2 Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 3 Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 4 Ahli Muda Geoteknik 	15%	
			<ol style="list-style-type: none"> 5 Ahli Muda K3 Konstruksi 6 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi 7 Ahli Muda Pelaksana Teknik Plumbing 8 Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 9 Ahli Muda Pengelola Rumah Susun 10 Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau 11 Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung 12 Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung 13 Ahli Muda Perencana Pondasi 14 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 15 Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil 16 Ahli Muda Perencanaan Iluminasi 17 Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara 18 Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator 19 Ahli Muda Quantity Surveyor 20 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 21 Ahli Muda Survei Pemetaan Udara 22 Ahli Muda Survei Terestris 23 Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 24 Arsitek Muda Interior 25 Asisten Arsitek 26 Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah 27 Manajer Logistik Proyek 28 Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung 29 Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 		

		<p>30 Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran 31 Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 32 Perancang Lanskap Muda 33 Spesialis SIG 34 Asisten Pemula Arsitek 35 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama 36 Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung 37 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung 38 Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal 39 Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum Utama 40 Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung 41 Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama 42 Perakit Struktur Bangunan RISHA 43 Perencana Struktur Bangunan RISHA 44 Quality Assurance Engineer 45 Quality Engineer 46 Quantity Surveyor Utama 47 Supervisor K3 Konstruksi Utama 48 Surveyor Rekayasa 49 Surveyor Terestris50 Teknisi Geoteknik *) dapat melampirkan SKK Kontruksi jenjang 8 dan 9 yang merupakan kelanjutan dari jabatan-jabatan kerja yang tercantum di atas yang masih berlaku.</p>		
--	--	--	--	--

LAMPIRAN III**NOMOR : 800/478/BKD-Gub-ST****TANGGAL : 19 September 2023****DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN
SURAT TANDA REGISTRASI (STR)**

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	DOKTER SPESIALIS AHLI	✓		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER AHLI	✓		Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI		✓	
4	APOTEKER AHLI	✓		
5	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		✓	
6	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		✓	
7	FISIOTERAPIS AHLI	✓		
8	PENATA ANESTESI AHLI	✓		
9	PERAWAT AHLI	✓		
10	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		✓	
11	PSIKOLOG KLINIS AHLI		✓	
12	RADIOGRAFER AHLI	✓		
13	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	✓		
14	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI		✓	
15	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI		✓	
16	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	✓		
17	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	✓		
18	FISIOTERAPIS TERAMPIL	✓		
19	NUTRISIONIS TERAMPIL	✓		
20	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	✓		
21	PERAWAT TERAMPIL	✓		
22	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	✓		
23	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		✓	
24	RADIOGRAFER TERAMPIL	✓		
25	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	✓		
26	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	✓		
27	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	✓		

LAMPIRAN IV

NOMOR : 800/478/BKD-Gub-ST

TANGGAL : 19 September 2023

**DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH**

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	Ahli Pertama - Guru Agama Budha	180
2	Ahli Pertama - Guru Agama Hindu	180
3	Ahli Pertama - Guru Agama Islam	180
4	Ahli Pertama - Guru Agama Katolik	180
5	Ahli Pertama - Guru Agama Kristen	180
6	Ahli Pertama - Guru Kelas	180
7	Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	170
8	Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	160
9	Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	185
10	Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	160
11	Ahli Pertama - Guru Matematika	170
12	Ahli Pertama - Guru Prakarya dan Kewirausahaan	180
13	Ahli Pertama - Guru Pendidikan Khusus	180
14	Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	170
15	Ahli Pertama - Guru PPKN	185
16	Ahli Pertama - Guru IPS	175
17	Ahli Pertama - Guru IPA	180
18	Ahli Pertama - Guru Bahasa Arab	195
19	Ahli Pertama - Guru Bahasa Jepang	170
20	Ahli Pertama - Guru Bahasa Jerman	185
21	Ahli Pertama - Guru Bahasa Mandarin	205
22	Ahli Pertama - Guru Bahasa Perancis	165
23	Ahli Pertama - Guru Biologi	185
24	Ahli Pertama - Guru Ekonomi	190
25	Ahli Pertama - Guru Fisika	160
26	Ahli Pertama - Guru Geografi	180
27	Ahli Pertama - Guru Kimia	190
28	Ahli Pertama - Guru Sejarah	205
29	Ahli Pertama - Guru Sosiologi	195
30	Ahli Pertama - Guru TIK	175
31	Ahli Pertama - Guru Antropologi	150
32	Ahli Pertama - Guru Teknik Perawatan Gedung	185
33	Ahli Pertama - Guru Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	220
34	Ahli Pertama - Guru Teknik Konstruksi dan Perumahan	195
35	Ahli Pertama - Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	205
36	Ahli Pertama - Guru Teknik Furnitur	180
37	Ahli Pertama - Guru Agribisnis Tanaman	175
38	Ahli Pertama - Guru Agribisnis Ternak	205
39	Ahli Pertama - Guru Agribisnis Perikanan	190
40	Ahli Pertama - Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	205
41	Ahli Pertama - Guru Kehutanan	180
42	Ahli Pertama - Guru Pemasaran	195
43	Ahli Pertama - Guru Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	185
44	Ahli Pertama - Guru Akuntansi dan Keuangan Lembaga	200
45	Ahli Pertama - Guru Usaha Layanan Pariwisata	205
46	Ahli Pertama - Guru Perhotelan	205

47	Ahli Pertama - Guru Kuliner	180
48	Ahli Pertama - Guru Kecantikan dan Spa	210
49	Ahli Pertama - Guru Seni Rupa	175
50	Ahli Pertama - Guru Desain Komunikasi Visual	175
51	Ahli Pertama - Guru Desain dan Produksi Kriya	160
52	Ahli Pertama - Guru Seni Pertunjukan	205
53	Ahli Pertama - Guru Broadcasting dan Perfilman	210
54	Ahli Pertama - Guru Animasi	210
55	Ahli Pertama - Guru Busana	200
56	Ahli Pertama - Guru Teknik Mesin	195
57	Ahli Pertama - Guru Teknik Otomotif	170
58	Ahli Pertama - Guru Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	205
59	Ahli Pertama - Guru Teknik Logistik	200
60	Ahli Pertama - Guru Teknik Elektronika	185
61	Ahli Pertama - Guru Teknik Pesawat Udara	205
62	Ahli Pertama - Guru Teknik Konstruksi Kapal	175
63	Ahli Pertama - Guru Kimia Analisis	190
64	Ahli Pertama - Guru Teknik Kimia Industri	180
65	Ahli Pertama - Guru Teknik Ketenagalistrikan	185
66	Ahli Pertama - Guru Teknik Energi Terbarukan	170
67	Ahli Pertama - Guru Teknik Geospasial	200
68	Ahli Pertama - Guru Teknik Geologi Pertambangan	185
69	Ahli Pertama - Guru Teknik Perminyakan	205
70	Ahli Pertama - Guru Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	195
71	Ahli Pertama - Guru Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	160
72	Ahli Pertama - Guru Layanan Kesehatan	215
73	Ahli Pertama - Guru Teknik Laboratorium Medik	190
74	Ahli Pertama - Guru Teknologi Farmasi	190
75	Ahli Pertama - Guru Pekerjaan Sosial	195
76	Ahli Pertama - Guru Teknika Kapal Penangkapan Ikan	195
77	Ahli Pertama - Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan	185
78	Ahli Pertama - Guru Teknika Kapal Niaga	205
79	Ahli Pertama - Guru Nautika Kapal Niaga	185

LAMPIRAN V**NOMOR : 800/478/BKD-Gub-ST****TANGGAL : 19 September 2023**

**DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNSIONAL**

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI MADYA - ANALIS KEBIJAKAN	270
2	AHLI MADYA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	225
3	AHLI MADYA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	252
4	AHLI MADYA - ARSIPARIS	225
5	AHLI MADYA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	158
6	AHLI MADYA - DOKTER SPESIALIS	158
7	AHLI MADYA - PEKERJA SOSIAL	293
8	AHLI MADYA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	270
9	AHLI MADYA - PENATA RUANG	180
10	AHLI MADYA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
11	AHLI MADYA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	293
12	AHLI MADYA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
13	AHLI MADYA - PRANATA KOMPUTER	270
14	AHLI MADYA - STATISTISI	270
15	AHLI MUDA - ANALIS KEBIJAKAN	270
16	AHLI MUDA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	225
17	AHLI MUDA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	252
18	AHLI MUDA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	252
19	AHLI MUDA - ARSIPARIS	225
20	AHLI MUDA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	158
21	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS	158
22	AHLI MUDA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	270
23	AHLI MUDA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	225
24	AHLI MUDA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	270
25	AHLI MUDA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	270
26	AHLI MUDA - PENATA RUANG	180
27	AHLI MUDA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
28	AHLI MUDA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
29	AHLI MUDA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	270
30	AHLI MUDA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
31	AHLI MUDA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	248
32	AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	270
33	AHLI MUDA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203

34	AHLI MUDA - PUSTAKAWAN	270
35	AHLI MUDA - STATISTISI	270
36	AHLI MUDA - WIDYAISWARA	203
37	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	248
38	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	158
39	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	225
40	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	203
41	AHLI PERTAMA - ANALIS DATA ILMIAH	315
42	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	225
43	AHLI PERTAMA - ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	203
44	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	207
45	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	225
46	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	270
47	AHLI PERTAMA - ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	225
48	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	225
49	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	207
50	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	252
51	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	315
52	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF	297
53	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	225
54	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	203
55	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	203
56	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	203
57	AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	315
58	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	252
59	AHLI PERTAMA - ANALIS STANDARDISASI	270
60	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
61	AHLI PERTAMA - APOTEKER	158
62	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	225
63	AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	255
64	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	225
65	AHLI PERTAMA - BIDAN	158
66	AHLI PERTAMA - DOKTER	158
67	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	158
68	AHLI PERTAMA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	158
69	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	158

70	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	158
71	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	158
72	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	158
73	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA	220
74	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	200
75	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN	203
76	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	200
77	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	225
78	AHLI PERTAMA - KONSELOR ADIKSI	270
79	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	252
80	AHLI PERTAMA - METROLOG	270
81	AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	203
82	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	158
83	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	270
84	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	270
85	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	293
86	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	158
87	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	293
88	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	225
89	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	203
90	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI	225
91	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA MEREK	225
92	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PATEN	225
93	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	203
94	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	158
95	AHLI PERTAMA - PENATA KADASTRAL	180
96	AHLI PERTAMA - PENATA KEHAKIMAN	293
97	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	225
98	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	225
99	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	225
100	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	248
101	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
102	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	225
103	AHLI PERTAMA - PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA	135
104	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	225
105	AHLI PERTAMA - PENATA PENERBITAN ILMIAH	315
106	AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	180
107	AHLI PERTAMA - PENATA PERTANAHAN	180
108	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	180
109	AHLI PERTAMA - PENELITI	338
110	AHLI PERTAMA - PENERA	203
111	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB	270
112	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	270
113	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA MANDARIN	270

114	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	225
115	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	252
116	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
117	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	252
118	AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	270
119	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	203
120	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220
121	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	203
122	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	252
123	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	252
124	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	203
125	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	203
126	AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	250
127	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	203
128	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	203
129	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
130	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	203
131	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	225
132	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN	230
133	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KURIKULUM	338
134	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN	248
135	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	203
136	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
137	AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	225
138	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
139	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	270
140	AHLI PERTAMA - PENGHULU	180
141	AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	225
142	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	203
143	AHLI PERTAMA - PENTASHIH MUSHAF AL QURAN	180
144	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA BUDDHA	180
145	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA HINDU	180
146	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM	180
147	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA KATOLIK	180
148	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA KRISTEN	180
149	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	225
150	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	203
151	AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	203
152	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	203
153	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	270
154	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERIKANAN	225
155	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	255
156	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	252
157	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	293
158	AHLI PERTAMA - PERAWAT	158
159	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	158

160	AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	338
161	AHLI PERTAMA - PERENCANA	315
162	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	297
163	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	248
164	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	270
165	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	203
166	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	158
167	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
168	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	180
169	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	158
170	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	225
171	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	158
172	AHLI PERTAMA - STATISTISI	270
173	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	225
174	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	158
175	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	180
176	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	158
177	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	158
178	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	158
179	AHLI PERTAMA - WIDYABASA	270
180	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	203
181	MAHIR - ARSIPARIS	225
182	MAHIR - ASISTEN PERPUSTAKAAN	225
183	MAHIR - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	203
184	MAHIR - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
185	MAHIR - PENGAWAS BIBIT TERNAK	252
186	MAHIR - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
187	MAHIR - PENYULUH PERTANIAN	252
188	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	270
189	MAHIR - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
190	MAHIR - SURVEYOR PEMETAAN	180
191	PEMULA - ASISTEN PENATA KADASTRAL	180
192	PEMULA - ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN	203
193	PEMULA - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	180
194	PEMULA - ASISTEN PRANATA SIARAN	180
195	PEMULA - ASISTEN TEKNISI SIARAN	180
196	PEMULA - MANGGALA AGNI	180
197	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	252
198	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	207
199	PEMULA - PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	225
200	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	225
201	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
202	PEMULA - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	225
203	PEMULA - PENGAMAT GUNUNG API	180
204	PEMULA - PENGAMAT TERA	203
205	PEMULA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220

206	PEMULA - PENGAWAS MUTU PAKAN	252
207	PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
208	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	220
209	PEMULA - PENGUJI MUTU BARANG	203
210	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	203
211	PEMULA - PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA	203
212	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	315
213	PEMULA - TEKNISI AKUAKULTUR	189
214	PEMULA - TEKNISI KESEHATAN IKAN	189
215	PEMULA - TEKNISI PERKEBUNRAYAAN	293
216	PENYELIA - ARSIPARIS	225
217	PENYELIA - PARAMEDIK VETERINER	252
218	PENYELIA - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	225
219	PENYELIA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
220	PENYELIA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
221	PENYELIA - PENYULUH PERTANIAN	252
222	PENYELIA - PRANATA KOMPUTER	270
223	PENYELIA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
224	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	203
225	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	252
226	TERAMPIL - ARSIPARIS	225
227	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	158
228	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KELAUKUDARAAN PESAWAT UDARA	200
229	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN	203
230	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	200
231	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA	200
232	TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	203
233	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	158
234	TERAMPIL - ASISTEN PENATA KADASTRAL	180
235	TERAMPIL - ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN	203
236	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	180
237	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	225
238	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	200
239	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	200
240	TERAMPIL - ASISTEN PENYULUH PERIKANAN	203
241	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	297
242	TERAMPIL - ASISTEN PERPUSTAKAAN	225
243	TERAMPIL - ASISTEN PRANATA SIARAN	180
244	TERAMPIL - ASISTEN STATISTISI	270
245	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	180
246	TERAMPIL - BIDAN	158
247	TERAMPIL - ENTOMOLOG KESEHATAN	158
248	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	158
249	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	158
250	TERAMPIL - MANGGALA AGNI	180

251	TERAMPIL - NUTRISIONIS	158
252	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	158
253	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	225
254	TERAMPIL - ORTOTIS PROSTETIS	158
255	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	270
256	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	252
257	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	252
258	TERAMPIL - PEMADAM KEBAKARAN	207
259	TERAMPIL - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	252
260	TERAMPIL - PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	225
261	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	225
262	TERAMPIL - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
263	TERAMPIL - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	225
264	TERAMPIL - PENERA	203
265	TERAMPIL - PENGAMAT GUNUNG API	180
266	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
267	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	252
268	TERAMPIL - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220
269	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	252
270	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	203
271	TERAMPIL - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
272	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
273	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	220
274	TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG	203
275	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	203
276	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	252
277	TERAMPIL - PERAWAT	158
278	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	158
279	TERAMPIL - PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA	203
280	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	248
281	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	270
282	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	158
283	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
284	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
285	TERAMPIL - RADIOGRAFER	158
286	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	158
287	TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN	180
288	TERAMPIL - TEKNISI AKUAKULTUR	189
289	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	158
290	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	158
291	TERAMPIL - TEKNISI KESEHATAN IKAN	189
292	TERAMPIL - TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN	315
293	TERAMPIL - TEKNISI PENERBANGAN	220
294	TERAMPIL - TEKNISI PERKEBUNRAYAAN	293
295	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	158

296	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	158
297	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	158
298	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	158
299	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	158

CONTOH SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN

Palu,

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengangkatan
CASN 2023

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sulawesi Tengah
Di –
Palu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, mohon perkenan Gubernur Sulawesi Tengah mengikutkan Kami dalam seleksi tersebut. Berikut identitas diri dan jabatan yang dilamar :

Nama :
Alamat :
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
NIK :
Pendidikan Terakhir : *SMK/SMA/D-III/S-1 Jurusan/Kualifikas Pendidikan
Kategori : *PPPK Tenaga Kesehatan/Guru/Teknis
Nama Jabatan Dilamar :
Nomor telepon / HP :
Alamat Email :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Ijazah terakhir berikut Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
2. KTP Nasional
3. Pas Foto Latar Merah uk. 3 x 4 cm
4. Surat Pernyataan yang di tandatangani dan di bubuhi e-Meterai dengan redaksi terlampir
5. Surat Tanda Registrasi (STR)
6. Asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis tingkat/disabilitas (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
7. File Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
8. Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti-Kemendikbudristek atau Surat Keterangan Ijazah (bagi lulusan PT Luar Negeri).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan bantuan Bapak, Kami Ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

10.000

ttd

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan : SMK/SMA/D-III/S-1 Jurusan/Kualifikas Pendidikan
NIK :
Agama :
Alamat :

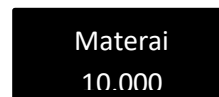
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara (2) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palu, 2023

Yang Membuat Pernyataan



TTD

Nama & Gelar

Catatan :

- 1) *Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer sesuai dengan format.*
- 2) *Menggunakan Materai Elektronik bukan materai fisik yang ditempel.*
- 3) *Tanda Tangan menggunakan tinta hitam.*

KOP INSTANSI/UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Alamat :

adalah benar bekerja di 1) sebagai 2)..... selama tahun bulan, Terhitung Mulai 3)..... sampai dengan saat ini, dengan jabatan 4)..... yang dianggap relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar sebagai 5).....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 2023



Jabatan Pimpinan Unit Kerja 6)

TTD

Nama Pimpinan Unit Kerja
NIP.

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Unit Kerja tempat pelamar bekerja saat ini.
2. Diisi dengan jeni kebutuhan pelamar : Tenaga Honor Kategori-II (THK-II)/Tenaga non ASN/Karyawan (Pilih salah satu)
3. Diisi dengan masa mengabdikan/bekerja pelamar (Tanggal, Bulan, Tahun).
4. Diisi dengan jabatan/tugas yang dikerjakan pelamar di unit kerjanya.
5. Diisi dengan nama formasi jabatan yang dilamar.
6. Ditandatangani oleh :
 - Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah.
 - Paling rendah direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan;

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir : SMK/SMA/D-III/S-1 (Jurusan/Kualifikasi Pendidikan)
Jabatan :
Unit Kerja Penempatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya telah ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), saya akan menjalankan tugas dan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sampai berakhirnya masa perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan saya bersedia untuk mundur sebagai PPPK, bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palu, 2023

Yang membuat pernyataan,

10.000

TTD

Nama & Gelar

Catatan :

- 1) Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer sesuai dengan format.*
- 2) Menggunakan Materai Elektronik bukan materai fisik yang ditempel.*
- 3) Tanda Tangan menggunakan tinta hitam.*